

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Denmark merupakan salah satu negara di kawasan Eropa dan Skandinavia yang seringkali berurusan dengan problematika pengungsi dan pencari suaka. Denmark telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi dalam menyesuaikan kebijakan imigrasinya dengan fenomena lonjakan pengungsi pada masa yang berbeda-beda. Saat Denmark dihadapkan dengan krisis pengungsi asal Suriah pada tahun 2013 hingga 2016, sosok Mette Frederiksen mulai menunjukkan sentralitas dan dorongannya untuk mengambil pendekatan yang lebih restriktif terhadap pengungsi. Saat lonjakan pengungsi Suriah meningkat, Frederiksen menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (*Beskæftigelsesminister*) dan kemudian dialihfungsikan menjadi Menteri Kehakiman (*Justitsminister*) di bawah pemerintahan Helle Thorning-Schmidt. Perjalanan Frederiksen selama mengemban tugas di Parlemen Denmark (*Folketing*) yang diiringi dengan fenomena krisis pengungsi, secara tidak langsung mendorongnya untuk memainkan peran dalam transformasi kebijakan imigrasi di Denmark.

Frederiksen memiliki motivasi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelayakan hidup bagi masyarakat Denmark, karena itulah ia selalu mengerahkan upaya yang memprioritaskan hal tersebut. Namun, problematika imigran merupakan hal yang dianggapnya sebagai hambatan, sehingga ia semakin terdorong untuk menciptakan Denmark yang bersih dari pengungsi dan pencari suaka. Ketika Frederiksen terpilih sebagai ketua umum partai *Socialdemokratiet*

pada tahun 2015, ia menjadi semakin intens dalam transformasi kebijakan imigrasi tersebut. Frederiksen berulang kali mendorong Parlemen Denmark untuk mengadaptasikan kebijakan repatriasi pengungsi, namun tak kunjung disetujui oleh pemerintahan Lars Løkke Rasmussen kala itu. Frederiksen kemudian didapuk menjadi Perdana Menteri Denmark pada pemilu 2019, dan ia juga memasukkan diskusi isu keimigrasian dalam masa kampanyenya.

Saat sudah menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri, Frederiksen dengan giat menunjukkan niatnya untuk menetapkan kebijakan repatriasi pengungsi yang sejak lama sudah diajukannya. Frederiksen kemudian memprakarsai visi *Zero Asylum Seekers* untuk memperlihatkan keseriusannya dalam menetapkan kebijakan repatriasi tersebut. Melalui proses yang panjang, akhirnya Frederiksen berhasil menetapkan kebijakan repatriasi pengungsi tersebut pada 3 Juni 2021, yang dituangkan dalam *Danish Aliens Act (Lovforslag nr. L 226)*. Selama proses tersebut, Frederiksen telah menunjukkan motivasi, menentang berbagai kendala politik, dan mengabaikan seluruh input dan informasi yang dilayangkan padanya, sehingga ia dicirikan sebagai pemimpin yang *crusader, directive, dan goal-driven* sesuai dengan kerangka pemikiran Margaret G. Hermann, dkk.

5.2 Saran

Kebijakan repatriasi yang ditetapkan oleh Denmark merupakan sesuatu yang baru bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Problematika pengungsi dan pencari suaka juga terus berlanjut di kawasan tersebut hingga saat ini. Untuk itu, peneliti menyarankan para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian

dengan kajian ini ke arah yang lebih baru. Denmark baru sampai pada titik pembangunan kamp dan fasilitas bagi pengungsi tersebut, sehingga masih terdapat berbagai celah yang bisa diteliti nantinya saat Denmark memang sudah sampai di tahap implementasi kebijakan tersebut. Kemudian, peneliti menyarankan para peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan kajian ini menggunakan kerangka pemikiran yang berbeda, sehingga dominasi Mette Frederiksen dapat dikembangkan dari sudut pandang yang berbeda.

Peneliti juga menyarankan agar para peneliti selanjutnya memasukkan kajian tentang arus pengungsi asal Ukraina akibat invasi yang dilakukan oleh Rusia, di mana pengungsi tersebut juga mencari suaka di Denmark. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan apakah Denmark akan memperlakukan pengungsi Ukraina tersebut selayaknya pengungsi Suriah, karena kebijakan repatriasi yang ditetapkan Denmark secara jelas menyebutkan pengungsi non-Barat sebagai target yang akan direpatriasi. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar para peneliti selanjutnya juga menjadikan seorang individu sebagai level analisis guna menciptakan kajian yang lebih unik dalam konteks perumusan kebijakan luar negeri suatu negara.